

Research Article

**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan
(Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Maluku Tengah)**

Sartje Sarah Alfons*, Miracle Soplanit, & Andress D. Bakarbesy
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
*saartjesarah@gmail.com

ABSTRACT

Problems with population administration services in areas characterized by islands, such as Central Maluku Regency, make it difficult for people to obtain population administration services such as processing KTPs and other population administration. The aim of this research is to conduct an analysis of government administration in population administration services in areas characterized by islands. The research method is normative legal research. The results of the research show that government administration in Central Maluku district regarding population administration services is still hampered because community population data processing has to go to the district capital, because the sub-district's authority is only limited to recording population data. The printing arrangements have to be taken to the district capital in Masohi City, where the distance to the district capital is very far so that obtaining population administration data requires a very large amount of funding. It is necessary to design alternative policies that can support the smooth administration of government in the field of population administration data services by delegating authority to sub-districts, establishing UPTD Disdukcapil in sub-districts, in order to realize harmony and balance in the relationship between the state and citizens.

Keyword: Administration of Government; Areas with Archipelagic Characteristics; Population Administration.

ABSTRAK

Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat.

Kata Kunci: Urusan Pemerintahan; Daerah Berciri Kepulauan; Administrasi Kependudukan.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan (NKRI) berdasarkan pada sistem desentralisasi dan asas Otonomi sebagaimana pengaturan dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada ayat:

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pemberian otonomi kepada Daerah dalam sistem desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sistem desentralisasi maka Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren (Muin, 2014), yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah (UU Pemda) mengatur bahwa Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar (Andiraharja, 2020).

Pasal 12 ayat (2) huruf f UU Pemda mengatur bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meskipun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tetapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik, dan dapat memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara dalam pelayanan public (Sumbu, 2010), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal tersebut maka administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan publik. Realitasnya bahwa wilayah Indonesia yang berciri kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (Soemarmi dkk, 2019), dan salah satu daerah di wilayah NKRI yang berciri kepulauan adalah Provinsi Maluku yang memiliki luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km, menghadapi persoalan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di wilayah pemerintahan daerah kabupaten Maluku Tengah yang meliputi Pulau Seram bagian Tengah, bagian utara dan timur Pulau Ambon, Kepulauan Lease (Pulau Haruku, Pulau Saparua dan Pulau Nusalaut), dan Kepulauan Banda.



Gambar 1. Peta wilayah pemerintahan daerah kabupaten Maluku Tengah

Hal ini dapat diketahui dari pandangan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi

kependudukan, diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), bahwa Warga Banda mengeluh karena harus ke kota Masohi untuk pengurusan administrasi kependudukan termasuk KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram. Hal ini dikarenakan untuk pengurusan administrasi kependudukan terutama KTP, masyarakat harus berlayar menggunakan kapal laut dari Banda. Itupun jika ada kapal yang langsung menuju Amahai dan kemudian naik kendaraan darat ke Masohi di Pulau Seram. Jika tidak, maka warga harus menempuh perjalanan dengan kapal laut menuju Kota Ambon, kemudian dari Ambon menuju Tulehu dan menyeberang lagi menggunakan sarana transportasi laut menuju Amahai untuk kemudian menuju Kota Masohi. Hal tersebut menunjukkan sebuah jalur perjalanan yang cukup panjang, melelahkan dan membutuhkan pembiayaan besar yang harus disediakan oleh Masyarakat di kecamatan Banda untuk mendapatkan pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Berbagai hal tersebut menjadi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan di wilayah yang berciri kepulauan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah

yang berciri kepulauan secara maksimal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang pelayanan administrasi kependudukan baik penelitian nasional maupun penelitian internasional, seperti penelitian yang dilakukan oleh Verent Nadya Chrismonita, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso dan Budiharto yang membahas tentang efektivitas Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (studi di disdukcapil kota magelang dalam rangka mewujudkan *good governance*) (Chrismonita dkk, 2020). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayat Rukayat yang membahas tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan Pasirjambu (Rukayat, 2017). Selanjutnya penelitian nasional lain yang juga membahas tentang penguatan pelayanan administrasi kependudukan pada umat agama Baha'i Di Pati Jawa Tengah yang dilakukan oleh Moh Rosyid dan Lina Kushidayati (Rosyid, & Kushidayati, 2021). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian internasional yang membahas tentang masalah penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dilakukan oleh M. Yusuf Sulfarano Barusman, Margono dan Appin Purisky Redaputri yang mana fokus kajiannya tentang perancangan model pelayanan prima pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Metro Indonesia (Barusman, Margono, & Redaputri, 2019). Penelitian internasional lainnya juga

pernah dilakukan oleh Minako Sakai yang fokus membahas tentang membangun kemitraan dalam penyelenggaraan layanan sosial di Indonesia: organisasi berbasis negara dan agama (Sakai, 2012). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang masalah penyelenggaraan administrasi kependudukan baik penelitian nasional maupun penelitian internasional, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas permasalahan seperti fokus penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki nilai pembeda dan memiliki nilai pembaharuan sehingga penting untuk dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif (Sonata, 2014) dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka (Benuf, & Azhar, 2020), selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah berciri kepulauan

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya (Suwartono, 2023). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Hadi, Mulyatno, & Santosa, 2015). Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi (Tjarsono, 2013), pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soemarsono, 2017). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di NKRI yang merupakan negara kepulauan maka aspek kewilayahan yang merupakan gugus pulau dan laut menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan efektivitas pembangunan dan pemerintahan diseluruh wilayah NKRI sehingga dapat mewujudkan tujuan negara. Menurut Kotan Y. Stefanus, bahwa beberapa persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kepulauan diantaranya, secara sosiologis realitas yang dihadapi oleh wilayah kepulauan diantaranya adalah (Stefanus, 2011):

- 1) Provinsi Kepulauan mempunyai perbedaan yang spesifik dengan provinsi-provinsi lain, yaitu karakteristik yang berbeda sehingga model pembangunannya harus berbeda dengan model yang umum;
- 2) manajemen administrasi pemerintahan haruslah berbasis kepulauan;
- 3) pelayanan masyarakat harus diarahkan ke pulau-pulau, karena masyarakat provinsi kepulauan hidup pada pulau-pulau yang terisolir;
- 4) rata-rata masyarakat pada provinsi kepulauan terlambat dalam pembangunan infrastruktur;
- 5) mempunyai pulau kecil terluar yang membutuhkan pendekatan *prosperity* dan *security* secara bersamaan.

Berbagai tantangan tersebut berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diterima oleh Masyarakat yang mendiami daerah yang berciri kepulauan. Pemerintah seakan-akan bertindak diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi Masyarakat yang mendiami wilayah yang berkarakter kepulauan (Alfath, & Salman, 2020). Hal ini dikarenakan bahwa fakta empiris yang terlihat secara konkret terkait dengan karakteristik daerah kepulauan adalah; terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar; terbatasnya kemampuan keuangan daerah; sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang sangat minim; biaya transportasi dalam rangka pelayanan pemerintahan yang sangat mahal;

terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum; masih adanya isolasi fisik dan sosial; adanya ketergantungan fiskal yang sangat tinggi kepada Pemerintah; belum berkualitasnya berbagai layanan pemerintahan baik layanan publik maupun sipil; masih adanya disparitas ekonomi antar daerah; dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (Tirtawati, Benuf, & Panjaitan, 2020).

Perbedaan mendasar dari wilayah yang bercirikan kepulauan dengan wilayah yang non kepulauan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan adalah bila wilayah yang bercirikan kepulauan maka berakibat pada jarak transportasi yang jauh sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan semakin sulit mendapatkan layanan administrasi kependudukan, hal ini akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah non kepulauan, akan mudah mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya pemerintah fokus memberikan perhatian pada penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di wilayah yang bercirikan kepulauan, seperti di wilayah Kabupaten

Maluku Tengah. Penyelenggaraan pemerintahan memiliki kecenderungan tidak maksimal pada daerah yang bercirikan kepulauan, sehingga tidak efektif dalam melayani masyarakat (Stefanus, 2011). Menurut Ni'matul Huda dan Despan Heryansyah (Huda, & Heryansyah,

2016), bahwa dalam hal-hal tertentu, karena perbedaan sifat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, akan timbul pula perbedaan kebutuhan. Perbedaan-perbedaan hajat hidup atau kebutuhan tersebut hanya akan terlayani dengan baik apabila satuan pemerintahan daerah yang dapat secara nyata (konkret) melihat dan mengetahui kebutuhan setempat, sehingga dapat mendesain berbagai kebijakan daerah yang sesuai untuk memenuhi kepentingan Masyarakat (Ridwansyah, 2017).

2. Problematika pelayanan Administrasi kependudukan di daerah bercirikan kepulauan (Studi di Kabupaten Maluku Tengah)

Kabupaten Maluku Tengah dengan ibukota Kota Masohi merupakan kota yang dibangun pada 3 November tahun 1957 yang diresmikan lewat peletakan batu pertama oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno. Terdapat 17 kecamatan di dalam wilayah pemerintahan administrative Kabupaten Maluku Tengah, diantaranya adalah: Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, Kecamatan Amahai, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Saparua, Kecamatan Saparua Timur, Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

Diantara berbagai kecamatan tersebut terdapat beberapa kecamatan yang tidak berada di daratan pulau Seram, dan terbentang dalam gugusan pulau-pulau yaitu; Kecamatan Banda yang berada di kepulauan banda, Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu, yang berada di Pulau Ambon, Kecamatan Pulau Haruku yang berada di Pulau Haruku, Kecamatan Saparua dan Saparua Timur yang berada di Pulau Saparua; dan Kecamatan Nusalaut yang berada di Pulau Nusalaut.



Gambar 2. Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah

Gambar tersebut merupakan Pulau Seram yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (PP Kecamatan) bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a, f dan h PP Kecamatan mengatur bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah

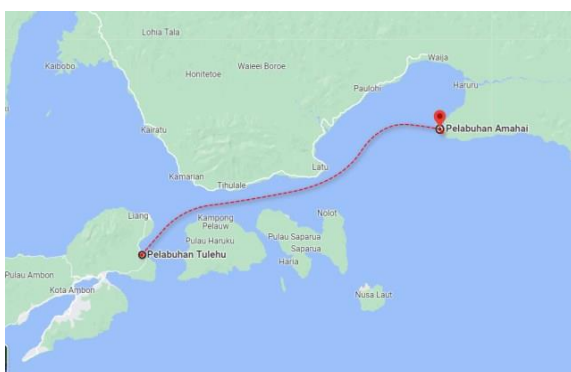
Terkait dengan hal tersebut maka menurut Camat Salahutu bahwa camat dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Maluku tengah khususnya di kecamatan salahutu berlangsung baik, namun dalam hal pengurusan seluruh administrasi kependudukan di kecamatan baik itu Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya berupa perekaman data masyarakat semata, sedangkan hasil perekaman tersebut akan dikirimkan ke Kota Masohi untuk dicetak. Dengan demikian, kecamatan tidak diberikan tanggungjawab untuk melakukan pelayanan pencetakan data administrative kependudukan seperti KK dan KTP, sehingga bagi Masyarakat yang ingin mendapatkan KK atau KTP harus mengurusnya sendiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Masohi. Kondisi yang sama juga dialami oleh kecamatan leihitu dan leihitu barat yang bersama-sama dengan kecamatan salahutu terletak di Pulau Ambon. Menurut Sekretaris Camat Leihitu bahwa seluruh data administrasi kependudukan baik, KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah dan Akte Kematian sangat tergantung dengan dinas catatan sipil. Hal ini disebabkan bahwa di kantor Kecamatan Laihitu terdapat alat /mesin perekaman KTP sehingga pelayanan perekaman data Masyarakat dapat dilakukan dengan lancar, namun untuk pencetakan seluruh administrasi kependudukan dilakukan pada Kantor Disdukcapil di Kabupaten Maluku Tengah yaitu di Masohi. Hal yang sama juga disampaikan oleh petugas perekam data kependudukan di Kantor Kecamatan leihitu Barat, bahwa pelayanan administrasi kependudukan hanya terbatas pada

proses perekaman data Masyarakat semata, sedangkan untuk proses pencetakan data administrative kependudukan dilakukan di kantor Disdukcapil di Kota Masohi.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh kantor kecamatan Saparua yang berada di pulau saparua maupun kecamatan Haruku yang berada di pulau Haruku. Dimana, menurut seksi pemerintahan kecamatan saparua, bahwa terkait dengan pelayanan terhadap administrasi kependudukan, maka tugas kantor kecamatan hanya sebatas perekaman data Masyarakat yang ingin mengurus data kependudukan, sedangkan proses pencetakannya di kota Masohi, padahal terdapat Unit pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Disdukcapil Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Saparua, tetapi hanya bertugas untuk memproses urusan pernikahan semata, berupa penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, masalah yang juga dihadapi oleh UPTD Disdukcapil adalah tidak dapat mencetak surat nikah sehingga Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan belum dapat memiliki surat nikah, karena harus berproses lagi di Disdukcapil yang berada di kota Masohi. Sementara itu di Kecamatan Haruku, mengalami kesulitan dalam pelayanan administrasi kependudukan karen saat ini alat rekam data Masyarakat mengalami kerusakan sehingga untuk proses perekaman data maupun pencetakan data administrasi kependudukan

harus dilakukan di Kota Masohi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan pemerintahan yang dilakukan oleh pemda kabupaten maluku Tengah melalui kantor kecamatan dalam pelayanan data administrasi kependudukan Masyarakat tidak dapat berlangsung dengan baik karena terkendala dengan keterbatasan tugas dan peran kecamatan, serta keterbatasan sarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan. Realitas tersebut memberikan dampak terhadap beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh Masyarakat untuk mendapatkan data kependudukan, karena terbebani dengan rentang kendali yang sangat panjang yang harus ditempuh oleh Masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan di gugusan pulau-pulau. Menurut Camat kecamatan Salahutu bahwa hal tersebut menyebabkan untuk mendapatkan KTP membutuhkan biaya yang sangat besar, baik itu biaya transportasi maupun akomodasi selama pengurusan data administrasi kependudukan di Kota masohi.



Gambar 3. Jalur Transportasi Masyarakat Di Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat Dan Salahutu Untuk Menuju Kota Masohi

Gambar tersebut merupakan jalur transportasi yang dilalui oleh Masyarakat di kecamatan leihitu, leihitu barat dan salahutu untuk menuju kota masohi dapat menggunakan angkutan laut Fery di desa liang dan Kapal cepat di desa tulehu, yang berada di wilayah kecamatan Salahutu yang dapat dituju dengan menggunakan angkutan darat. Jika menggunakan Fery maka akan tiba di desa kairatu wilayah kabupaten seram bagian barat, kemudian melanjutkan perjalanan lagi sekitar 3-4 jam menuju kota masohi di kabupaten maluku tengah. Sedangkan jika menggunakan Kapal cepat akan menempuh waktu sekitar 1,5 jam untuk tiba di Pelabuhan amahai kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke kota masohi sekitar 15 menit dengan menggunakan angkutan umum.

Sementara itu bagi Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan haruku, saparua, nusalaut dan banda harus menempuh perjalanan lagi melalui laut dari kecamatan masing-masing menuju pulau ambon kemudian dilanjutkan ke desa liang jika ingin menumpang fery menuju masohi atau ke desa tulehu jika ingin menuju masohi dengan menggunakan kapal cepat. Dengan jalur perjalanan tersebut maka biaya yang dapat dikeluarkan untuk pengurusan data administrasi kependudukan dapat mencapai Rp. 1000.000, . Hal tersebut tentunya sangat memberatkan keuangan Masyarakat, terutama masyarakat yang hanya menggantungkan hidupnya dari berkebun dan sebagai nelayan tradisional. Persoalan utama yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan yakni jangkauan pelayanan publik yang demikian luas dan berat, yang tersebar pada sejumlah pulau sehingga cukup sulit untuk menyelenggarakan pelayanan secara cepat, mudah dan terjangkau, serta adanya keterbatasan berbagai sarana penunjang pelayanan pemerintahan bagi Masyarakat (Irawan, 2017). Untuk itulah perlu adanya pengaturan khusus untuk dapat menjawab kebutuhan Masyarakat sesuai dengan karakteristik atau kekhususan daerah.

3. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah berciri kepulauan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sekaligus sebagai perwujudan sila kelima dan kedua yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Suhardin, 2012). Salah satu bentuk perwujudan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam kesetaraan dalam pelayanan pemerintahan khususnya dalam proses pelayanan administrasi kependudukan yang efisien bagi masyarakat serta menghindari adanya perbedaan/diskriminasi

dalam pelayanan tersebut. Tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Lismanto, & Utama, 2020), dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh negara diharapkan dapat membawa dampak bagi meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa fungsi Negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga Negara (Yanuar, 2021). Fungsi tersebut disampaikan oleh Mac Iver dengan istilah fungsi *welfare*. Dalam perkembangannya, aliran ini memandang bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai instrument kekuasaan semata (*instrument of power*) melainkan mulai dipandang sebagai tool pelayanan (*an agency of service*) (HR, 2013).

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Marilang, 2016). Konsep *welfare state* merupakan sebuah gagasan yang mengkonsepkan negara

menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan warga negara seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, dan perlindungan masalah sosial warga Negara (Diyati, 2019).

Terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan maka Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hal ini menunjukkan bahwa adanya keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi realitasnya masih terdapat berbagai kendala dalam proses pelayanan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada Masyarakat yang mendiami daerah yang berciri kepulauan. Hal tersebut adalah persoalan rentang kendali yang cukup panjang dan terbatasnya sarana dalam mendukung proses pelayanan public tersebut. Plato melalui pemikirannya dalam buku *Politeia* menggambarkan sebuah negara yang adil karena adanya pengaturan yang seimbang sesuai bagiannya dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga harapannya dapat

dicapai keadilan bagi semua unsur bernegara sebab tiap-tiap kelompok (filsuf, tentara, pekerja) berbuat sesuai dengan tempatnya dan tugasnya (Anshori, 2016). Konsepsi keadilan Plato tersebut dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Nasution, 2014). Hal tersebut menunjuk pada konsep keadilan Plato yang menekankan pada keharmonisan atau keselarasan. Sementara itu, keadilan Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi, dengan membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Bahwa penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Lebih lanjut bahwa teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan, yang tercermin dalam ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak

sama diperlakukan secara tidak sama (Sahnan, Fathoni, & Salat, 2015).

Hal inilah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berciri kepulauan, bahwa kondisi geografis daerah berciri kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau maka kebijakan pelayanan pemerintahan yang diterapkan juga harus berbeda dengan kebijakan pelayanan pemerintahan yang diterapkan pada daerah yang berciri continental. Menurut Camat salah satu solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu diberikan kewenangan untuk merekam dan mencetak seluruh kepengurusan administrasi kependudukan di tiap kecamatan masing atau dengan membuat kelembagaan UPTD di masing-masing kecamatan agar bisa menjawab kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Sekaligus keberadaan kecamatan atau UPTD dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu dengan adanya desentralisasi maka adanya pendelegasian sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah dibawahnya. Kebijakan desentralisasi yang berarti juga distribusi kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan atau rumah tangga sendiri (Rosadi, 2015). Dengan demikian akan terbentuk pemerintahan lokal yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, sesuai

dengan karakteristik daerah masing-masing. Esensi dari desentralisasi adalah untuk dapat mengatasi permasalahan yang kompleks terkait dengan keberagaman dan ciri khusus yang dimiliki oleh daerah, seperti ; budaya, agama, adat istiadat serta luas wilayah (Hadjon, 2002). Untuk itu, di kecamatan leihitu dan leihitu barat dibuat kebijakan agar proses pencetakan dokumen administrasi kependudukan Masyarakat di kota masohi akan dilakukan oleh perutusan pegawai kecamatan setelah proses perekam telah selesai dilakukan di kecamatan, sehingga Masyarakat tidak perlu lagi ke kota masohi untuk pengurusan data tersebut. Sementara itu, kecamatan Saparua dan Haruku menyatakan bahwa jika memang kewenangan pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat dilimpahkan pada kecamatan maka pemerintah daerah dapat mendesain kebijakan pengurusan administrasi kependudukan secara mobile, dengan secara langsung mendatangi Masyarakat untuk dilayani. Menurut seksi pemerintahan pada kecamatan saparua bahwa kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Pemda kabupaten maluku Tengah melalui Disdukcapil yang secara khusus datang ke kecamatan saparua untuk melayani pengurusan KTP bagi siswa yang telah lulus sekolah menengah Tingkat atas (SMA), dengan tujuan agar kelengkapan data pribadi siswa SMA yang telah lulus terpenuhi agar dapat menunjang proses untuk dapat melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi (PT).

Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan” (Herawati, & Utami, 2014), agar kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan pemerintah dapat dinikmati semua lapisan Masyarakat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memberikan ruang bagi perkembangan daerah secara mandiri atau otonom, sehingga daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bahwa keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat baiknya terbangun dalam hubungan yang fungsional proporsional antara kekuasaan negara dan kepentingan warga masyarakat dengan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat berinisiatif untuk dapat mendesain suatu alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan data administrasi kependudukan pada daerah berciri kepulauan, yaitu; melimpahkan kewenangan bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, yang ditunjang dengan penyiapan sarana pendukung kebijakan tersebut, jika tidak dilimpahkan kebijakan tersebut maka dapat dibuat kebijakan pelayanan pengurusan administrasi secara mobile dengan mengunjungi

Masyarakat secara langsung untuk melakukan pelayanan. Pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan dan didukung oleh SDM dan sarana penunjang pelayanan data administrasi kependudukan.

Terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat secara esensial dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia (Gedeona, 2004) dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan maka kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah yang terkait dengan kebijakan administrasi kependudukan masih terkendala dengan proses pelayanan publik, seperti rentang kendali yang sangat jauh antara kecamatan dengan ibu kota kabupaten, serta masih terkendala dengan keterbatasan sarana penunjang kebijakan administrasi kependudukan di kecamatan sehingga masyarakat dibebankan untuk ke kota masohi dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan.

Bahwa pemerintah daerah harus dapat berinisiatif untuk mendesain suatu alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, hal tersebut ditujukan demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat secara esensial dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Alfath, Tahegga Primananda., & Salman, Radian, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, (No. 2),pp.2016–2235. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>
- Andiraharja, Diyar G. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13, (No.1),pp.52–68. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005>
- Barusman, M. Yusuf Sulfarano., Margono., & Redaputri, Appin Purisky (2019). Design of Excellent Service Model on Department of Population and Civil Registration In City of Metro, Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol.8,(No.2),pp.52–60. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i2.197>
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1),pp.20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Chrismonita, Verent Nadya, Dewi, Dyah Adriantini Sintha., Suharso., & Budiharto. (2020). Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Borobudur Law Review*, Vol.2, (No.2), pp.64–89. <https://doi.org/10.31603/burrev.3917>
- Diyati, Elviandri Khuzdaifah A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.31,(No.2),pp.252–266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto. (2004). Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi di Tengah Kekuatan Modal. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3,(No.2),pp.170–188. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1536>

- Hadi, Eko Sasmito., Mulyatno, Imam Pujo., & Santosa, Ari Wibowo Budi. (2015). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Tangkap Tradisional Di Kawasan Pesisir Pantai Moro Demak Dalam Uapaya Peningkatan Produksi Dan Penghematan BBM. *Kapal*, Vol.12,(No.3),pp.151–157.
<https://doi.org/10.12777/kpl.12.3.151-157>
- Herawati, Yunie., & Utami, Yenni Sri. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila). *Paradigma*, Vol.18,(No.1),pp.28–38.
<https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2405>
- Huda, Ni Matul., & Heryansyah, Despan. (2016). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.26, (No.2), pp.238–258.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Irawan, A. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah De'Jure*, Vol.2, (No.2), pp. 202–218.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejurer.v2i2.1300>
- Lismanto., & Utama, Yos Johan. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.3),pp.416–433.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Marilang. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, (No.2),pp.259–286.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk922>
- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, (No. 2),pp.69–79. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Nasution, Bahder J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*,Vol.3,(No.2),pp.118–130.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. *Padjadjaran Journal of Law*, Vol.2, (No.3),pp.241–263.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a7>
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.30,(No.2),pp. 300–323.<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.is>

- s2.art4
- Ridwansyah, Muhammad. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, (No.4), pp.838–858. <https://doi.org/10.31078/jk1447>
- Rosyid, Moh., & Kushidayati, Lina. (2021). Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Umat Agama Baha'i Di Pati Jawa Tengah. *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51,(No.2),pp.201–118. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.132>
- Rukayat, Yayat. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 11, (No. 2), pp.56–65. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32>
- Sahnani., Fathoni, M. Yazid., & Salat, Musakir. (2015). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.3, (No.3), pp.421–434. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i9.257>
- Sakai, M. (2012). Building a partnership for social service delivery in Indonesia: state and faith-based organisations. *Australian Journal of Social Issues*, Vol.47, (No.1), pp.373–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2012.tb00254.x>
- Soemarmi, Amiek., Indarti, Erlin., Pujiono, & Diamantina, Amalia. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.48, (No.3),pp. 241–248. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>
- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.37,(No.2),pp.300–322. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss2/6>
- Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.15–35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Stefanus, Kotan Y. (2011). Daerah Kepulauan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11,(No.1),pp.99–111. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.80>
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.42, (No.3),pp. 300–318. DOI:10.21143/jhp.vol42.no3.274
- Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.17,(No.4),pp.567–588. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4>

Tirtawati, Septi Dyah., Benuf., Kornelius & Panjaitan, Bob Martin. (2020). Rencana Strategis Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Kecil dan Terluar. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.5,(No.1),pp.110–126.

<https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3498>

Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, Vol.4, (No.2), pp. 881–894.

<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211>

Yanuar, Muh. Afdal. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, (No.1), pp.41–67.

<https://doi.org/10.31078/jk1816>

BUKU

Anshori, Abdul G. (2016). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.